

Manajemen Pengetahuan Dan Sikap Berbasis Pendekatan Androgogi Solusi Masalah Lingkungan Akibat Perilaku Kegiatan Ekonomi Batubara

Aloysius Hardoko^{1*}, Susilo², Vincetius Yulianis Tarukan³

¹ Fakultas Pendidikan dan Keguruan PKn Universitas Mulawarman

² Fakultas Pendidikan dan Keguruan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman

³ Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur

* Corresponding email: aloysiushardoko@yahoo.co.id

Abstract: Pelaku utama kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI di Kalimantan Timur adalah orang dewasa. Dampak perilaku kegiatan ekonomi tambang batu bara koridor 3 MP3EI di Kalimantan Timur terkait masalah lingkungan, ikut dirasakan orang dewasa. Selama ini upaya instansi terkait mengatasi masalah lingkungan tidak efektif karena tidak sesuai akar permasalahan. Akar masalah adalah Perilaku orang dewasa yang dapat diubah melalui pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penyebab ketidak efektifan program mengatasi masalah lingkungan, karena tidak disesuaikan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang dewasa sebagai sasaran program mengatasi masalah lingkungan setelah kegiatan tambang batu bara. Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi urgen mengelola permasalahan lingkungan terkait pelibatan orang dewasa dalam implementasi program mengatasi masalah lingkungan akibat tambang batu bara. Mengacu pada permasalahan di atas maka tujuan akhir (Tahun 3) penelitian ini adalah mengembangkan manajemen pengetahuan, sikap dan keterampilan berbasis pendekatan androgogi (orang dewasa) sebagai solusi masalah lingkungan akibat kegiatan ekonomi tambang batu bara koridor MP3EI di Kalimantan Timur. Makalah ini menyajikan hasil penelitian tahun 1 terkait analisis kebutuhan untuk pengembangan manajemen. Metode penelitian adalah Penelitian pengembangan diawali analisis kebutuhan dengan teknik wawancara, observasi dan FGD untuk mendapatkan data lembaga pemerintahan dan perusahaan batu bara dalam memajemen program mengatasi masalah lingkungan selama ini. Analisis data secara kualitatif melalui reduksi data, display data, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan sebelum dan setelah kegiatan tambang batu bara terjadi peningkatan baik dari macam kerusakan maupun kategori kerusakan, karena manajemen program mengatasi masalah lingkungan oleh pemerintah maupun perusahaan tambang batu bara, belum berdasarkan pada akar permasalahan. Adapun manajemen program yang diterapkan bersifat top down dan tidak sesuai dengan penyebab kerusakan lingkungan yakni perilaku orang dewasa.

Keywords: manajemen androgogi, masalah lingkungan, batu bara, Koridor MP3EI

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Secara umum kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia ditandai dengan gejala masalah berupa bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai tropis, kenaikan muka air laut, peningkatan abrasi, dan ketidak pastian musim. Gejala masalah bencana alam ini dari tahun ke tahun selalu berulang dan bahkan dirasakan semakin tahun gejala masalah tersebut semakin sering terjadi dan semakin meluas sehingga banyak menelan korban dari sisi manusia dan kerugian finansial akibat kerusakan fisik. Pertanyaan mendasar adalah mengapa masyarakat, kebijakan pemerintah belum berpihak pada perlindungan lingkungan? Walaupun masyarakat sebagaian besar dan pemerintah telah mengetahui bahwa bencana alam terjadi karena perilaku manusia yang tidak melindungi lingkungan.

Berdasarkan deskripsi pada alinea di atas patut diduga bahwa solusi yang digunakan selama ini belum efektif untuk mengatasi permasalahan

perubahan lingkungan. Salah satu faktor utama yang membuat tidak efektifnya solusi yang digunakan adalah tidak sesuai dengan akar masalah, sehingga jika diibaratkan dokter salah memberikan obat pada pasien karena obat yang diberikan pada tingkat gejala penyakit bukan pada akar masalah penyakit. Hal senada terjadi dengan solusi masalah lingkungan di Indonesia sehingga bukan menyembuhkan tetapi semakin memperparah dengan munculnya gejala masalah baru dan meluasnya gejala masalah yang ada terkait kerusakan lingkungan.

Hasil penelitian terkait melalui skim penelitian masterplan percepatan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI) (Hardoko, 2013 dan Rahmawati, 2013) menunjukkan salah satu akar masalah utama penyebab kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur adalah terkait perilaku masyarakat yang menganggap lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup, diperparah oleh kebijakan pemerintah yang merusak alam sebagai akibat dari kurangnya kesadaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang berulang dan bahkan semakin meluas dan dirasakan semakin sulit mencari jalan keluar (solusi).



Sebagai contoh, terjadi di Kalimantan Timur. Sejak tahun 1970 an sudah terjadi penebangan hutan besar-besaran yang pada pertengahan era delapan puluhan menurun atau berhenti karena bahan baku kayu sudah semakin sulit diperoleh. Ternyata perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah merusak lingkungan tidak berhenti dan malah berlanjut dengan pengerukan batu bara secara besar-besaran akibat mudahnya memperoleh perijinan dari pemerintah pusat dan daerah dan sebagai dampak dari ditetapkannya fokus kegiatan ekonomi koridor 3

MP3EI salah satunya adalah batubara. Belum lagi habis kegiatan merusak alam melalui kegiatan tambang batu bara, muncul lagi program pemerintah sejuta hektar sawit yang juga diikuti oleh masyarakat baik melalui program plasma maupun mengelola sawit secara mandiri.

Berikut ini disajikan rekapitulasi pertambangan batubara dengan konsesi ijin Nasional (PKP2B) di Kalimantan Timur.

Tabel 1. Rekapitulasi Tambang Batubara PKP2B di Kalimantan Timur

N0	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	P.T Kelian Equatorial Mining (KEM)	Kutai barat
2	P.T Kaltim Prima Coal (KPC)	Kutai Timur
3	P.T. Indominco Mandiri (IM)	Kutai Timur
4	P.T. Multi Harapan Utama (MHU)	Kutai Kartanegara
5	P.T. Tanito Harum (TH)	Kutai Kartanegara
6	P.T. Berau Coal (BC)	Kabupaten Berau
7	P.T. Kideco Jaya Agung (KJA)	Kabupaten Paser
8	P.T. Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC)	Kutai Barat
9	P.T. Lana Harita Indonesia (LHI)	Kota Samarinda
10	P.T. Mandiri Inti Perkasa (MIP)	Kab. Tana Tidung
11	P.T. Mahakam Sumber Jaya (MSJ)	Kutai Kartanegara
12	P.T. Kartika Sela Bumi Mining (KSBM)	Kutai Kartanegara
13	P.T. Trubaindo Coal Mining (TCM)	Kutai Kartanegara
14	P.T. Singlurus Pratama Coal (SPC)	Kutai Kartanegara
15	P.T. Insani Bara Perkasa (IBP)	Kutai Kartanegara
16	P.T. Delima Mining Corporation (DMC)	Kab. Bulungan
17	P.T. Santan Batubara (SB)	Kutai kartanegara
18	P.T. Pesona Kathulistiwa (PK)	Kab. Bulungan
19	P.T. Trabsisi Energi(TE)	Kota Samarinda

Sumber: Dokumentasi Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur, 2012

Ironisnya adalah bahwa masyarakat di Indonesia atau Kalimantan Timur pada khususnya telah merasakan dampak dari perilaku yang tidak melindungi lingkungan, seperti kekeringan selama musim kemarau, mudah kebakaran hutan, banjir saat musim hujan, suhu semakin panas, perubahan fluktuasi cuaca tidak dapat diprediksi dan lebih banyak efek lainnya. Ketika ditanya penyebab masalah lingkungan akan dijawab karena sebagian besar perilaku manusia yang tidak ramah dengan alam, sedangkan nenek moyang telah memberikan contoh untuk selalu bersikap ramah dengan alam. Sebagai contohnya adalah perilaku Suku dayak. Suku dayak telah lama menerapkan sistem ladang berpindah. Ladang berpindah pada intinya mengikuti siklus tanam secara alami.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk mengembangkan manajemen pengetahuan dan sikap berbasis pendekatan androgogi. Melalui pendekatan androgogi, teladan orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terutama seseorang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat yang penting. Tokoh masyarakat cenderung diikuti baik dalam kata atau perbuatan, sehingga contoh tokoh masyarakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan warga dalam melindungi lingkungan. Demikian pula, untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi sebuah budaya.

Hal ini lebih efektif ditangani oleh orang dewasa karena orang dewasa dianggap lebih mampu berpikir yang diharapkan dapat mengubah perilaku dalam hal kebiasaan sejak kecil. Menurut Notoatmodjo (2007), orang dewasa telah memiliki pengetahuan yang akan mengubah sikap dan perilaku karena perubahan perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan keyakinan, nilai-nilai dan motivasi predisposisi. Penelitian ini adalah penelitian skim MP3EI *multi year* (rencana tiga tahun) dengan sumber dana dikti. Pemaparan pada artikel ini adalah bagian dari hasil tahapan analisis kebutuhan (tahun pertama) untuk keperluan pengembangan manajemen pengetahuan dan sikap berbasis pendekatan andragogi.

Permasalahan

Pelaku kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI di Kalimantan Timur adalah orang dewasa, hal ini juga menjadi pertimbangan mendasar sehingga penelitian ini berfokus pada pendekatan androgogi. Berdasarkan akar permasalahan yang terungkap pada alinea di atas maka penelitian ini terfokus pada:

- Bagaimana cara lembaga pemerintahan memajemen program mengatasi masalah



- lingkungan akibat perilaku orang dewasa pada kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI Di Kalimantan Timur?
- b. Bagaimana cara perusahaan memajemen program terkait kegiatan tambang batu bara untuk mengatasi masalah lingkungan akibat perilaku orang dewasa pada kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI Di Kalimantan Timur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Melakukan penggalan data secara mendalam dan *holistic* terkait cara lembaga pemerintahan memajemen program mengatasi masalah lingkungan akibat perilaku orang dewasa pada kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI Di Kalimantan Timur?
- b. Melakukan penggalan data secara mendalam dan *holistic* terkait cara perusahaan memajemen program terkait kegiatan tambang batu bara untuk mengatasi masalah lingkungan akibat perilaku orang dewasa pada kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI Di Kalimantan Timur?

2. METODE PENELITIAN

Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Tahun pertama penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari analisis kebutuhan dari metode penelitian dan pengembangan dari rencana tiga tahun untuk pengembangan manajemen pengetahuan dan sikap berbasis pendekatan androgogi sebagai solusi masalah lingkungan akibat perilaku kegiatan ekonomi batu bara koridor 3 MP3EI di Kalimantan Timur. Penelitian tahun pertama (analisis kebutuhan) menggunakan paradigma *post positivisme* dengan metode penelitian kualitatif, yaitu memperoleh gambaran secara mendalam dan *holistic*, memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya (Lexy Moleong 2000). Peneliti bermaksud mengkaji persoalan yang muncul manajemen lingkungan oleh lembaga pemerintahan dan perusahaan tambang dan berupaya menemukan alternatif manajemen pengetahuan dan sikap berbasis pendekatan androgogi sebagai solusi masalah lingkungan akibat perilaku kegiatan ekonomi batu bara koridor 3 MP3EI di Kalimantan Timur.

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan FGD (*Focus Group Discussion*), studi literature dan dokumentasi. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam didukung dengan FGD (*Focus Group Discussion*). Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam yang

diperoleh langsung dari pihak Distamben dan BKLH Kabupaten Berau, Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara, Distamben Kota Samarinda, Disbuntanakan Kabupaten Paser, Disbuntanakan Kutai Barat, *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan batubara, sebagai key informan.

Data sekunder dalam penelitian ini data kuantitatif dari data sekunder berupa studi literatur dan dokumentasi pada lembaga pemerintahan dan perusahaan, yang digunakan untuk memperkaya dan memperkuat hasil wawancara, observasi lapangan. Mengacu pada metode dan tujuan penelitian maka instrumen penelitian adalah wawancara, focus group discussion (FGD) dan observasi untuk memperoleh gambaran yang mendasar (*grounded*) dan menyeluruh (*holistic*) terkait cara lembaga pemerintahan dan perusahaan manajemen program mengatasi masalah lingkungan akibat perilaku orang dewasa pada kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI Di Kalimantan Timur.

Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data Tahun Pertama (Analisis Kebutuhan)

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tim peneliti dengan menggunakan teknik wawancara, FGD dan observasi didukung literatur dan dokumentasi. Responden dalam penelitian tahun pertama adalah untuk lembaga pemerintahan distamben dan BKLH Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupatten Berau, dan Kota Samarinda. Sedangkan untuk perusahaan batubara Berau *Coal* dan Gunung Bayan, Kideco Jaya Agung, Turbaindo *Coal Mining*, Lana Harita Jaya Agung yang beroperasi di daerah yang menjadi lokasi penelitian.

Teknik penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan pola *purposive sampling*, menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan responden dalam penelitian ini adalah:

Daerah yang paling banyak memiliki ijin konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Timur.

Daerah ring 1, yaitu daerah/wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat interpretatif, yaitu menjelaskan makna di balik peristiwa yang ada di lapangan (Suharsimi Arikunto, 2006). Penelitian ini juga merupakan studi kasus yang dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang sebuah fenomena individual, kolektif, organisasi, dalam aspek social dan politik (Robert K. Yin, 2002).

Kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan *member cek*. Triangulasi dilaksanakan dengan mengecek kebenaran data dari responden melalui *snowball sampling* kepada informan dan kembali lagi ke responden (jika diperlukan) terkait lainnya baik dalam lingkungan lembaga pemerintahan maupun dalam lingkungan perusahaan dan perwakilan masyarakat. *Member cek* dilaksanakan melalui kegiatan *focus*



group discussion (FGD) setelah wawancara dan triangulasi untuk keseluruhan indikator manajemen program kerusakan lingkungan selesai, dengan cara membacakan kembali hasil rekaman dialog (rekonstruksi dialog) dalam bentuk hasil deskripsi dialog oleh tim peneliti kepada responden dan informan setelah proses wawancara dan triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*deep interview*) seperti proses wawancara pada responden.

Prosedur pengumpulan data diawali dengan kesepakatan waktu antara peneliti dan responden untuk pelaksanaan wawancara dan FGD serta observasi. Setelah mencapai kesepakatan peneliti melaksanakan kegiatan wawancara pada responden dan triangulasi pada informan, serta *member cek* baik pada responden maupun pada informan melalui FGD. Kegiatan selanjutnya menganalisis awal untuk mendapatkan gambaran terkait hal-hal yang sudah jenuh (*redundance*) karena setelah proses triangulasi dan *member cek* jawaban baik responden maupun informan sudah sama, atau hal-hal yang masih perlu ditanyakan diagali karena belum mendasar (*grounded*) pada responden dan triangulasi pada informan. Pada saat melakukan wawancara mendalam baik pada responden maupun pada informan peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

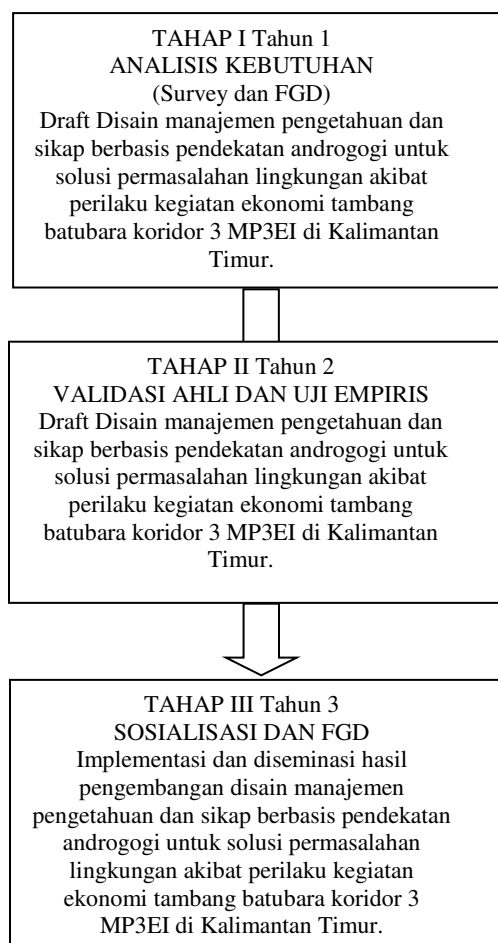
Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai langkah awal yakni diskusi dalam tim peneliti terhadap hasil pada saat kegiatan wawancara dan observasi (pada responden dan informan melalui proses triangulasi), *focus group discussion* (FGD) untuk *member cek* terjadi pada akhir pengumpulan data setelah wawancara dan triangulasi. pustaka dan dokumentasi, terkait cara lembaga pemerintahan dan perusahaan memajemen program mengatasi masalah lingkungan akibat perilaku orang dewasa pada kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI Di Kalimantan Timur.

Prosedur analisis data yang ditempuh mengacu pada penelitian kualitatif meliputi: 1) *data collection*, 2) *data reduction*, 3) *data Display* dan 4) *conclusion/ verification* (Miles & Huberman, 1994). Mengacu pada prosedur analisis data kualitatif maka selesai melaksanakan wawancara, triangulasi dan *member cek* dan mencapai *redundance* (kejenuhan) sebagai bagian dari pencapaian kredibilitas data, sampai pada tahapan ini tim peneliti telah memiliki koleksi data (*data collection*) setelah memiliki koleksi data tim peneliti mengadakan rapat tim untuk melaksanakan kegiatan reduksi data (*data reduction*) dengan tujuan untuk menelaah koleksi data yang sudah berulang atau sudah sama akan mengalami seleksi atau pengurangan. Langkah selanjutnya adalah tayangan data (*data display*) yakni berupa deskripsi dengan pengkategorisasian dan diengkapi dengan rekonstruksi dialog yang menggambarkan *grounded, holistic, triangulasi, redundance*, dan

member cek untuk pencapaian kredibilitas data. Prosedur analisis data terakhir adalah kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*) dilaksanakan melalui menyimpulkan atau memverifikasi hasil pada tayangan data (*data display*)

Rencana penelitian pengembangan *research and development* (R&D) dalam tiga tahun skim MP3EI dengan judul manajemen pengetahuan dan sikap berbasis pendekatan androgogi sebagai solusi masalah lingkungan akibat perilaku kegiatan ekonomi tambang batubara koridor 3 MP3EI di Kalimantan Timur, mengacu pada metode penelitian pengembangan hasil adaptasi dari model pengembangan produk Dick and Carey, pada bagan 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Penelitian Pengembangan Selama 3 Tahun

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mengacu pada prosedur analisis data kualitatif maka selesai melaksanakan koleksi data (*data collection*) dan reduksi data (*data reduction*) maka tahap selanjutnya adalah tayangan data (*data display*) dan

kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*). Pada bagian hasil penelitian ini akan berisi tayangan data (*data display*) dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*). Adapun bentuk tayakan data (*data display*) adalah melalui pengkategorisasian dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan contoh mewakili rekonstruksi dialog setelah itu kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*).

Tabel 1 Rekapitulasi Tayangan Data (*data display*) Kategorisasi Prosedur Penyusunan Perencanaan Managemen Program Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Mengatasi Masalah Lingkungan

No	Responden	Kategori	
		<i>bootomup</i>	<i>Topdwon</i>
1	Lembaga Pemerintahan		✓
2	Perusahaan Tambang Batubra		✓

Berikut contoh rekonstruksi dialog untuk penggalian data baik pada lembaga pemerintahan maupun pada perusahaan tambang, sehingga memenuhi kategori *grounded*, *holistic*, triangulasi, *member cek*, dan *redudance*, dalam rangka pencapaian kredibilitas data. Contoh rekonstruksi dialog ini pada saat wawancara dengan responden (lembaga pemerintah distamben) dan informan (Bapeda, tokoh msyarakat) terkait prosedur penyusunan perencanaan program mengatasi masalah lingkungan pada perwakilan lembaga pemerintahan:

Peneliti: apa saja aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana program untuk mengatasi masalah lingkungan?
 Responden: aspek dana, kerusakan lingkungan yang terjadi, program dari pusat.
 Peneliti: dari ke tiga aspek yang disebutkan aspek mana yang sering diabaikan ?
 Responden: aspek kerusakan lingkungan
 Peneliti: mengapa demikian?
 Responden: Karena kalau tidak ada dana dan tidak diprogramkan oleh bagian perencanaan di Bapeda maka tidak bisa terlaksana.

Langkah selanjutnya peneliti mengadakan **triangulasi** dengan informan di Bapeda (bagian perencanaan daerah)
 Peneliti: Bagaimana cara menepatkan rencana program mengatasi masalah lingkungan?
 Informan: melihat porsi anggaran dan kepentingan yang mendesak
 Peneliti: Lebih mengutamakan yang mana apakah porsi anggaran atau kepentingan mendesak?
 Informan: Porsi anggaran
 Peneliti: siapa yang menetapkan prorsi anggaran?
 Informan: di bapeda
 Peneliti: apakah ada pihak lain yang dilibatkan
 Informan: ada
 Peneliti: siapa
 Informan: dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup

Peneliti: apakah ke dua lembaga ini mengajukan program terkait mengatasi lingkungan akibat kegiatan tambang?

Informan: mengajukan
 Peneliti: jika pengajuan oleh kedua lembaga ini tidak sesuai dengan porsi anggaran bagaimana cara yang ditempuh?
 Informan: lembaga menyesuaikan dengan yang sudah ada dalam perencanaan Bapeda
 Peneliti melaksanakan **triangulasi** kembali pada responden.

Peneliti: apakah Bapeda mengundang pada saat rapat penetapan anggaran?

Responden: mengundang tetapi pada akhirnya apa yang direncanakan Bapeda yang terjadi.

Peneliti: bagaimana hasil program yang diterapkan selama ini untuk mengatasi masalah lingkungan?

Responden: Tidak efektif
 Peneliti: bagaimana cara mengetahui selama ini program mengatasi lingkungan tidak efektif?
 Responden: hasil observasi masalah nyata yang terjadi dan keluhan masyarakat.

Peneliti: apakah tokoh masyarakat dilibatkan pada saat penyusunan rencana program mengatasi masalah lingkungan sebelum diajukan ke bapeda?
 Responden: tidak karena msyarakat dilibatkan jika program sudah berjalan (pelksanaan program)

Peneliti: apakah melibatkan tenaga ahli?
 Responden: tidak

Peneliti selanjutnya melaksanakan **triangulasi** dengan tokoh masyarakat.
 Peneliti: bagaimana program pemerintah dan perusahaan untuk mengatasi masalah lingkungan?

Informan : tidak tepat karena masalahnya tetap ada bahkan semakin parah contoh banjir, kekeringan, hutan sudah semakin berkurang, kabut asap akibat kebakaran hutan.

Peneliti: Apakah tokoh masyarakat dilibatatkan oleh pemerintah dalam merencanakan program mengatasi masalah lingkungan?

Informan: tidak, biasanya partisipasi dalam program pemerintah dan itu tidak semua.

Hasil observasi (terjadi saat musim kemarau) oleh tim peneliti menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tetap terjadi karena kegiatan tambang batubara sehingga areal hutan semakin sedikit, kabut asap akibat kebakaran hutan.

Setelah selesai melaksanakan wawancara pada responden dan triangulasi pada informan dan responden, selanjutnya tim peneliti membacakan hasil konstruksi dialog pada responden dan informan sebagai bagian dari kegiatan *member cek* melalui *focuss group disscution* (FGD) yang dilaksanakan pada bagian akhir pengumpulan data. Konstruksi dialog yang sama terjadi pada rekapitulasi tayangan data kategori pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program, pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi, serta kesesuaian program antara (distaben, BKLH, dan perusahaan).



Tabel 2. Rekapitulasi Tayangan Data (*data display*) Kategorisasi Pelaksanaan Manajemen Program Lembaga Pemerintahan Mengatasi Masalah Lingkungan

No	Responden	Kategori	
		Tidak Sesuai Perencanaan	Sesuai Perencanaan
1	Lembaga Pemerintahan		√
2	Perusahaan Tambang batubara		√

Tabel 3. Rekapitulasi Tayangan Data (*data display*) Kategorisasi Monitoring dan Evaluasi Manajemen Program Lembaga Pemerintahan Mengatasi Masalah Lingkungan

No	Responden	Kategori	
		Tidak Sesuai Perencanaan	Sesuai Perencanaan
1	Lembaga Pemerintahan		√
2	Perusahaan Tambang batubara		√

Tabel 4. Rekapitulasi Tayangan Data (*data display*) Kategorisasi Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Manajemen Program Lembaga Pemerintahan Mengatasi Masalah Lingkungan

No	Responden	Kategori	
		Tidak dimanfaatkan	Dimanfaatkan
1	Lembaga Pemerintahan	√	
2	Perusahaan Tambang batubara	√	

Tabel 5. Rekapitulasi Tayangan Data (*data display*) Kategorisasi Koordinasi Manajemen Program antara Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Mengatasi Masalah Lingkungan

No	Responden	Kategori	
		Tidak koordinasi	koordinasi
1	Lembaga Pemerintahan		√
2	Perusahaan Tambang batubara		√

Pembahasan

Berdasarkan hasil seperti yang tertuang dalam tabel 1 rekapitulasi hasil rekonstruksi dialog, menunjukkan bahwa manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan indikator tahap perencanaan, lembaga pemerintahan dan perusahaan memiliki perencanaan namun perencanaan yang dibuat tidak berdasarkan akar permasalahan lingkungan di daerah ini, karena lembaga pemerintahan maupun perusahaan dalam merencanakan tidak melibatkan masyarakat dan tenaga ahli yang relevan, serta hasil perencanaan setelah diajukan ke Bapeda masih mengalami perubahan atau pengurangan karena menyesuaikan dengan porsi anggaran yang sudah disediakan untuk lembaga ini yakni dinas pertambangan dan badan koordinasi lingkungan hidup (BKLH).

Pada perusahaan hal yang sama terjadi. Tupoksi perusahaan untuk program lingkungan adalah berada pada bagian *social corporate responsibility* (CSR). Perencanaan program mengatasi masalah lingkungan tidak berbasis akar masalah karena tidak

melibatkan tokoh masyarakat dan hanya mengandalkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta tidak pernah melibatkan pihak luar yang merupakan pakar dalam analisis masalah lingkungan, sehingga dalam program perencanaan tidak efektif. Perencanaan program mengatasi masalah lingkungan oleh CSR selanjutnya diajukan ke bagian direksi dan hasil akhirnya adalah menyesuaikan dengan persentase anggaran yang sudah ditetapkan perusahaan untuk program CSR. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *inventarisasi; evaluasi; perencanaan, pengelolaan dan pemantauan*. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis. (Lembaga advokasi 2013).



Berdasarkan hasil seperti yang tertuang dalam tabel 2 rekapitulasi hasil rekonstruksi dialog, menunjukkan manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan indikator tahap pelaksanaan. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini tahapan pelaksanaan program, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, melaksanakan program sesuai dalam perencanaan, namun karena terjadi permasalahan pada saat perencanaan, sehingga walaupun pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan permasalahan lingkungan tetap terjadi dan bahkan menjadi lebih parah. Definisi-Definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktor-faktor tertentu seperti faktor fisik, biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, termasuk di negara saya sendiri, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Taman-Taman dan tanaman-tanaman yang terlindung memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan. (Herawaty, 2011)

Berdasarkan hasil seperti yang tertuang dalam tabel 3 rekapitulasi hasil rekonstruksi dialog, menunjukkan manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan indikator tahap monitoring dan evaluasi. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini tahapan monitoring dan evaluasi, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, melaksanakan monitoring dan evaluasi, namun karena terjadi permasalahan pada saat perencanaan, sehingga walaupun terjadi monitoring dan evaluasi hasilnya tidak efektif karena permasalahan lingkungan tetap terjadi dan bahkan menjadi lebih parah. Salah satu isu penting dalam globalisasi adalah masalah lingkungan. Oleh karena itu, semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Masyarakat dunia telah bereaksi untuk turut serta memberikan kepedulian terhadap

lingkungan melalui deklarasi yang dibuat oleh konferensi PBB di *Stockholm* pada bulan Juni 1972. deklarasi tersebut tentang perlindungan lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan ajakan dalam usaha koordinasi ke seluruh dunia lewat partisipasi global tidak hanya negara-negara maju tetapi juga negara-negara berkembang (Cenandra, 2013)

Berdasarkan hasil seperti yang tertuang dalam tabel 4 rekapitulasi hasil rekonstruksi dialog, menunjukkan manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan indikator pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini tahapan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, belum memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, karena kurangnya pemahaman dan merasa pesimis karena selama ini yang terjadi sebageian besar program yang diajukan tidak diakomodir oleh bagian perencanaan dalam hal ini Bapeda.(Agus Merwan 2012)

Berdasarkan hasil seperti yang tertuang dalam tabel 5 rekapitulasi hasil rekonstruksi dialog, menunjukkan manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan indikator koordinasi antar lembaga pemerintahan dan perusahaan tambang batu bara. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini koordinasi antar lembaga pemerintahan dengan perusahaan batu bara, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, Kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, belum melaksanakan koordinasi karena yang terjadi adalah masing-masing merencanakan program. Audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan. Audit lingkungan merupakan satu alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performasi lingkungan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut United States Environmental Protection Agency (US EPA), Audit Lingkungan adalah suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi secara periodik dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan pentaatan kebutuhan lingkungan. Dalam perkembangan selanjutnya audit lingkungan mencakup beberapa bidang antara lain sistem manajemen lingkungan pelaksanaan produksi bersih, pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan minimisasi limbah. Audit lingkungan merupakan upaya proaktif suatu perusahaan untuk perlindungan lingkungan yang akan membantu perusahaan meningkatkan



efisiensi dan pengendalian emisi, polutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat terhadap perusahaan. (Farid Mazuki, 2011).

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rekapitulasi tayangan data (*display data*) untuk 5 kategori sebagai indikator untuk mengetahui manajemen program mengatasi masalah lingkungan oleh pemerintah dan perusahaan tambang batubara di kabupaten Kutai Barat, kabupaten Paser, kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Berau, dapat di tarik beberapa kesimpulan atau verifikasi (*conclution/verifikasi*) sebagai bagian akhir dari prosedur analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan kategori perencanaan. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini tahapan perencanaan, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, menerapkan manajemen perencanaan berdasarkan *top down*. Artinya Lembaga pemerinth dan perushaan tambang merencanakan program tetpi yang berjalan adalah program yang sesuai dengan alokasi dana yang sudah ditentukan oleh Bpeda untuk pemerintahan, sedangkan untuk perusahaan sesuai dengan persentaasi anggaran oleh perusahaan untuk kegitan CSR. Hal ini mengakibtkan progrm yang direncanakan tidak mengakomodir akar permasalahan penyebab terjadinya masalah lingkungan di daerah lokasi penelitian ini.
- b. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan kategori pelaksanaan program. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini tahapan pelaksanaan program, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, melaksanakan program sesuai dalam perencanaan, namun karena terjadi permasalahan pada saat perencanaan, sehingga walaupun pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan mengakibatkan permasalahan lingkungan tetap terjadi dan bahkan menjadi lebih parah.
- c. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan kategori monitoring dan evaluasi. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait

manajemen dalam hal ini tahapan monitoring dan evaluasi, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, melaksanakan monitoring dan evaluasi, namun karena terjadi permasalahan pada saat perencanaan, sehingga walaupun terjadi monitoring dan evaluasi hasilnya tidak efektif karena permasalahan lingkungan tetap terjadi dan bahkan menjadi lebih parah.

- d. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan kategori pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini tahapan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, belum memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, karena kurangnya pemahaman dan merasa pesimis kareana selama ini yang terjadi sebagaian besar program yang diajukan tidak diakomodir oleh bagian precanaan dalam hal ini Bapeda.
- e. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan dengan kategori koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun perusahaan tmbang baru bara dalam perencanaan pogram mengatasi masalah lingkungan. Hasil rekapitulasi rekonstruksi dialog dapat disimpulkan atau diverifikasi bahwa terkait manajemen dalam hal ini koordinasi antar lembaga pemerintahan dengan perusahaan batu bara, baik lembaga pemerintahan terkait yakni dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup (BLH), kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Kertegara, kabupaten Paser, kabupten Berau, dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lokasi penelitian, belum melaksanakan koordinasi karena yng terjadi adalah masing-msing merencanakan program.

Saran

Mencagu pada kesimpulan maka terdapat beberapa saran yang disampaikan kepada pihak terkait baik responden maupun praktisi masalah lingkungan sebagai berikut:

- a. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan penting untuk dimulai dari tahapan perencanaan, yang berbasis pada akar permasalahan yang terjadi, sehingga pada tahap perencanaan penting sekali melibatkan masyarakat dan pakar yang terkit untuk menganalisis dan merencanakan program mengatasi akar masalah lingkungan. Jadi bukan didasarkan pada porsi anggaran yang disiapkan.



- b. Manajemen program mengatasi masalah lingkungan harus dimulai dari tahapan perencanaan yang merupakan hasil koordinasi antar lembaga pemerintahan terkait dengan perusahaan tambang batu bara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Merwan. (2012). 7 Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Lingkungan. <http://blog.umy.ac.id/directions/?p=24>
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Canendra. (2013). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. <http://abuduagj.blogspot.co.id/2013/01/pendidikan-lingkungan-hidup-bagi.html>
- Hettyherawati. (2012). *Upaya Dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://hettyherawati2704.wordpress.com/2012/01/28/upaya-stategi-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>
- FaridMuzaki. (2011). *Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* <http://faridmuzaki.blogspot.co.id/2011/09/masalah-pengelolaan-lingkungan-hidup-di.html>
- Lembaga Advokasi dan Study Lingkungan Hidup. (2013). *Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Bagi Orang Dewasa*. <http://lanshlamongan.blogspot.co.id/2013/03/pendidikan-lingkungan-hidup-dan.html>
- Marzo. (2013). *Belajar Peduli Lingkungan Melalui Pendidikan Sejak Dini*. <https://www.rare.org/es/node/6446#.V1TeDOQ8V5U>
- Khoirunnas. (2012). *Kebijakan Lingkungan Di Indonesia*. <http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/09/kebijakaan-lingkungan-di-indonesia.html>

